MODEL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: STUDI KASUS SISTEM “JIMPITAN” DI MADRASAH DINIYAH

Murwanto Setyo Nugroho¹, Harsono², Dwi Setyo Astuti³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: q100240006@student.ums.ac.id¹, harsono@ums.ac.id², dsa122@ums.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi sistem jimpitan sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan pendanaan pendidikan di madrasah pedesaan Indonesia melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jimpitan, yang mengandalkan kontribusi sukarela masyarakat dalam bentuk uang atau barang, efektif mengatasi keterbatasan dana, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kepercayaan melalui pelaporan keuangan yang transparan. Strategi yang diusulkan mencakup edukasi tentang pentingnya kontribusi, opsi donasi fleksibel, pelatihan manajemen keuangan, dan diversifikasi sumber pendanaan. Dengan pendekatan terstruktur berbasis digitalisasi dan akuntabilitas, sistem ini berpotensi meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menjadi model partisipatif untuk keberlanjutan operasional pendidikan di daerah terpencil.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan, Sistem Jimpitan.

***Abstract:** This research explores the jimpitan system as an innovative solution to overcome education funding challenges in Indonesian rural madrasahs through qualitative analysis. The research results show that the jimpitan system, which relies on voluntary contributions from the community in the form of money or goods, is effective in overcoming limited funds, strengthening social solidarity, and increasing trust through transparent financial reporting. Proposed strategies include education about the importance of contributions, flexible donation options, financial management training, and diversification of funding sources. With a structured approach based on digitalization and accountability, this system has the potential to improve access and quality of education and become a participatory model for the sustainability of education operations in remote areas.*

***Keywords:** Education Financing, Squeeze System.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan di pedesaan merupakan elemen penting untuk menjamin keberlanjutan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Ketimpangan antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan, yang dipengaruhi keterbatasan dana, infrastruktur, serta tenaga pendidik, masih menjadi tantangan serius di Indonesia (Sofiani, 2024; Ulfa, 2023). Ketergantungan pada dana pemerintah pusat sering membatasi otonomi daerah, sehingga pengelolaan pendidikan kurang optimal (Andrea, 2020). Penelitian mengungkapkan bahwa

pelatihan perencanaan pembiayaan dapat meningkatkan kolaborasi antara sekolah, guru, dan masyarakat untuk mendukung mutu pendidikan (Permana, 2023).

Rendahnya APK dan APM di pedesaan menunjukkan perlunya perencanaan pembiayaan yang strategis, termasuk investasi pada infrastruktur dan fasilitas belajar (Khotimah & Iswati, 2015; Ulfa, 2023). Keterlibatan masyarakat dalam pendanaan dan pengelolaan pendidikan meningkatkan akuntabilitas serta relevansi program pendidikan dengan kebutuhan lokal (Sofiani, 2024). Namun, tantangan geografis dan sosial ekonomi menghambat sekolah terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (Ulfa, 2023). Digitalisasi administrasi pendidikan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat (Sarjito, 2023).

Selain itu, pengembangan kapasitas guru melalui pelatihan profesional harus menjadi prioritas untuk menjamin efektivitas pengajaran (Sofiani, 2024). Dalam konteks desentralisasi, peluang daerah untuk mengelola pendidikan secara mandiri perlu didukung dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pengelolaan dana dan sumber daya berjalan efektif (Andrea, 2020). Dengan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kapasitas lokal, kolaborasi antar pihak, serta pemanfaatan teknologi, pendidikan pedesaan dapat berkembang lebih baik dan mendukung pembangunan sumber daya manusia berkualitas.

Keterbatasan sumber daya finansial di sekolah pedesaan Indonesia menjadi tantangan signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ketergantungan pada alokasi dana pemerintah yang sering kali tidak mencukupi berdampak pada pengurangan jumlah guru, buruknya pemeliharaan fasilitas, serta minimnya kegiatan pengembangan siswa (Isma, 2023; Luqman, 2023; Suhandi & Robi'ah, 2022). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan solusi inovatif seperti penggalangan dana masyarakat, kemitraan dengan sektor swasta, dan dukungan lembaga non-pemerintah (Diartho, 2018; Moridu, 2023).

Penggunaan teknologi informasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan efisiensi operasional. Platform digital memungkinkan sekolah menjangkau donor potensial, mendukung pembelajaran jarak jauh, serta meningkatkan akuntabilitas (Isma, 2023; Sarjito, 2023). Selain itu, alokasi dana juga perlu difokuskan pada pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, di mana desentralisasi pendidikan berpotensi memperkuat peran daerah dalam mengelola pendidikan secara lebih mandiri, meskipun tetap membutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat

(Luqman, 2023; Rusandi, 2023). Melalui kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi, sekolah pedesaan diharapkan dapat mengatasi keterbatasan finansial dan meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata dan berkelanjutan di Indonesia.

Sistem Jimpitan adalah alternatif pengelolaan keuangan berbasis partisipasi masyarakat, orang tua siswa, dan pihak terkait, yang bertujuan mengatasi keterbatasan dana di sekolah pedesaan melalui transparansi dan akuntabilitas (Nasution & Hasan, 2021; Setianti, 2024). Keterlibatan masyarakat dalam sistem ini tidak hanya mendukung pengumpulan dana, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan (Gunadhi et al., 2019; Manurung et al., 2021).

Keunggulan Jimpitan terletak pada partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan untuk mendukung kebutuhan seperti perbaikan fasilitas, pengadaan alat belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler (Candradewi, 2023). Sistem ini juga meningkatkan efisiensi melalui pencatatan keuangan yang akurat, dibantu teknologi informasi untuk meminimalkan kesalahan pengelolaan dana (Hidayatika, 2024; Rejeki, 2023). Selain itu, Jimpitan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan melalui penggalangan dana sekaligus menjadi sarana komunikasi yang memperkuat dukungan masyarakat terhadap program sekolah (Hadiwiyanti, 2021; Khosyi'in et al., 2023).

Agar efektif, jimpitan memerlukan transparansi dalam pengelolaan dana dengan laporan keuangan terbuka dan pengawasan masyarakat (Prayitno, 2023; Setiawansyah et al., 2021). Dalam konteks desentralisasi pendidikan, sistem ini mendukung otonomi sekolah untuk lebih mandiri dan inovatif dalam pengelolaan keuangan, sesuai kebutuhan lokal (Arsana & Lestari, 2021; Putra, 2023). Dengan pendekatan kolaboratif ini, Jimpitan berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan pedesaan dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Dengan latar belakang di atas perlu mengkaji lebih dalam mengenai sistem jimpitan yang diterapkan beberapa jenis sekolah, sehingga penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan menganalisis efektivitas sistem jimpitan sebagai model pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan mengenai sistem jimpitan sebagai salah satu alternatif sumber dana penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas dan keberlanjutan pendidikan. Beragam teori dan model telah dikembangkan, seperti model berbasis kualitas yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam penggunaan dana pendidikan (Sofiani, 2024). Pendekatan ini memastikan efektivitas pengelolaan dana untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, khususnya di lembaga modern seperti pesantren, yang sering menghadapi tantangan pengelolaan keuangan.

Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat juga penting dalam pembiayaan pendidikan (Ulfa, 2023). Model ini mencerminkan prinsip desentralisasi, di mana daerah diberi otonomi untuk mengelola pendidikan dengan melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan lokal. Di sisi lain, pendekatan berbasis kearifan lokal menonjolkan potensi nilai-nilai dan sumber daya masyarakat setempat. Misalnya, model berbasis swadaya mendorong masyarakat untuk berkontribusi melalui sumbangan, penggalangan dana, atau beasiswa berbasis prestasi (Andrea, 2020).

Selain itu, model berbasis potensi umat seperti school levy juga menarik perhatian. Pajak properti yang dibayarkan oleh masyarakat mampu menjadi sumber dana tambahan yang stabil untuk pendidikan, meskipun implementasinya memerlukan dukungan dan kesepakatan masyarakat (Permana, 2023). Semua pendekatan ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan laporan keuangan yang jelas, masyarakat lebih cenderung mendukung pembiayaan pendidikan (Khotimah & Iswati, 2015).

Pendekatan pembiayaan pendidikan berbasis gotong royong sangat relevan dalam konteks Indonesia, dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk mendukung pendanaan pendidikan. Sistem ini tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi juga memanfaatkan sumbangan masyarakat, zakat, dan kegiatan gotong royong lainnya. Nursiniah (2024) menyatakan bahwa dana BOS merupakan sumber utama dalam mendukung operasional sekolah, namun keberhasilan pengelolaannya sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap pendidikan di daerah mereka.

Selain dana BOS, masyarakat juga dapat berkontribusi melalui sumbangan langsung atau

kegiatan penggalangan dana. Menurut Aslindah (2022), penggalangan dana yang efektif dapat melengkapi fasilitas pembelajaran dan meningkatkan kesejahteraan guru. Kegiatan seperti bazar atau konser amal menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat berkontribusi secara sukarela. Lebih jauh, Banjarnahor (2024) menekankan pentingnya kepala madrasah memahami dan mengelola berbagai sumber dana secara efektif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan program pendidikan.

Dalam pendidikan Islam, sumber dana tambahan seperti wakaf, zakat, dan sedekah memiliki peran signifikan. Diana (2023) menyoroti bahwa kontribusi ini dapat membantu lembaga pendidikan Islam mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah dan menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan. Transparansi dalam pengelolaan dana juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut.

Pendekatan gotong royong tidak hanya mendukung pembiayaan tetapi juga membangun karakter siswa. Rahmad (2021) menyebutkan bahwa kegiatan gotong royong seperti membantu sesama atau menjaga lingkungan sekolah dapat menanamkan nilai-nilai sosial pada siswa. Hal ini sejalan dengan upaya pendidikan karakter yang bertujuan menciptakan generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga peduli terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, gotong royong dalam pembiayaan pendidikan adalah pendekatan inklusif dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pendidikan, seperti dirangkum oleh Darmawan (2024), tercipta rasa tanggung jawab bersama yang memperkuat solidaritas sosial sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Sistem jimpitan adalah bentuk gotong royong khas Indonesia yang telah lama digunakan, termasuk dalam pembiayaan pendidikan. Praktik ini mencerminkan solidaritas sosial dan budaya masyarakat, di mana pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Sejarahnya terkait erat dengan tradisi gotong royong yang menekankan kerja sama dalam menghadapi tantangan kolektif. Sebagai respons terhadap keterbatasan dana pendidikan, terutama di pedesaan, jimpitan menjadi mekanisme yang memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap pendidikan (Khotimah & Iswati, 2015; Sarjito, 2023).

Sistem ini melibatkan pengumpulan dana secara berkala melalui sumbangan sukarela dari anggota masyarakat. Dana yang terkumpul digunakan untuk kebutuhan pendidikan seperti perbaikan fasilitas sekolah, buku, atau kegiatan ekstrakurikuler. Prosesnya dapat berlangsung secara manual, seperti pengumpulan di tempat ibadah, atau melalui metode digital untuk

meningkatkan efisiensi, sebagaimana ditunjukkan oleh Kurniawati dan Mawardi (Sarjito, 2023).

Manfaat utama sistem jimpitan adalah meningkatkan akses pendidikan di daerah kurang terlayani dan pemererat hubungan sosial antarwarga. Namun, tantangan seperti ketidakpastian jumlah sumbangan dan kurangnya kesadaran kolektif dapat memengaruhi efektivitasnya (Andrea, 2020; Khotimah & Iswati, 2015).

Perbandingan antara model berbasis kualitas dan kolaborasi dengan pendekatan kearifan lokal menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model sistematis berbasis kualitas sering terkendala birokrasi, sedangkan pendekatan lokal lebih fleksibel tetapi kurang konsisten (Rejeki, 2023) . Mengintegrasikan kedua pendekatan ini dapat menciptakan sistem pembiayaan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Pendidikan yang dikelola dengan pendekatan kombinitif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif (Rahayu & Rahayu, 2014).

Sebagai solusi alternatif yang mencerminkan nilai sosial dan budaya Indonesia, jimpitan berpotensi meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meskipun membutuhkan pengelolaan yang baik untuk mengatasi tantangan yang ada (Permana, 2023; Ulfa, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukann dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan mendalami fenomena pendidikan madrasah diniyah. Penelitian ini dilakukukan di Madrasah Diniyah Majreeha Kabupaten Boyolali. Madrasah ini didirikan oleh salah satu perangkat desa setempat yang berfokus pada pendidikan agama islam. Teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Creswell, 1994). Wawancara dilakukan dengan kepala madrasah, guru, orang tua siswa, dan masyarakat guna menggali pandangan terkait pendidikan dan sistem jimpitan. Observasi partisipatif mencatat aktivitas pembelajaran, interaksi, dan keterlibatan masyarakat (Anas, 2023).

Berikut butir pertanyaan wawancara dengan sasaran kepala madrasah, guru, orang tua dan masyarakat terkait sistem jimpitan:

Tabel 1. Butir Pertanyaan Wawancara

Aspek	Butir Pertanyaan
<i>Mekanisme dan Kesesuaian Kontribusi</i>	<i>Bagaimana mekanisme pengumpulan kontribusi dari wali santri dalam sistem jimpitan, dan bagaimana cara</i>

Aspek	Butir Pertanyaan
	<i>memastikan kontribusi tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga?</i>
<i>Pengelolaan Dana dan Transparansi</i>	<i>Untuk apa saja dana hasil jimpitan biasanya dialokasikan, dan bagaimana madrasah memastikan transparansi dalam pelaporannya kepada wali santri?</i>
<i>Efektivitas dan Dampak Sistem</i>	<i>Apa yang membuat sistem jimpitan ini efektif, dan bagaimana kontribusi kecil dari setiap keluarga dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan operasional madrasah?</i>
<i>Nilai Kebersamaan dan Stabilitas Keuangan</i>	<i>Bagaimana sistem jimpitan membantu menanamkan nilai kebersamaan kepada para santri dan menciptakan stabilitas keuangan madrasah, khususnya dalam mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah atau donatur?</i>

Data dianalisis melalui analisis tematik dan triangulasi untuk validitas. Analisis dokumen seperti kurikulum dan laporan kegiatan menambah konteks terkait pengelolaan pendidikan dan integrasi nilai lokal. Analisis tematik dimulai dengan transkripsi wawancara, pengkodean data, identifikasi tema, interpretasi, dan pelaporan (Huda, 2016). Tema yang dihasilkan mencerminkan kontribusi kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Triangulasi data memastikan validitas dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Desain ini bertujuan memberikan wawasan tentang kontribusi kearifan lokal dan masyarakat dalam pendidikan pedesaan serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan (Rahmawati et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem jimpitan di Madrasah Diniyah adalah model gotong royong yang efektif dalam mendukung pembiayaan operasional pendidikan, khususnya di daerah pedesaan yang minim sumber daya. Seorang guru madrasah menjelaskan bahwa pelaksanaannya melibatkan kontribusi sukarela berupa uang atau hasil bumi dari wali santri setiap bulan. *"Sistem jimpitan di madrasah kami dijalankan dengan meminta kontribusi berupa uang atau hasil bumi dari wali santri setiap bulannya. Besarannya tidak dipatok terlalu tinggi, melainkan sesuai kemampuan masing-masing keluarga. Biasanya, wali santri menyerahkan langsung ke pengurus madrasah atau melalui kotak yang disediakan,"* jelasnya. Beliau juga menegaskan bahwa tujuan sistem ini adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam keberlangsungan pendidikan agama di wilayah tersebut.

Pengurus madrasah menambahkan bahwa sistem ini telah berlangsung lama dan membantu operasional madrasah, seperti membayar listrik, memperbaiki fasilitas, dan menyediakan buku untuk santri kurang mampu. *"Kami menggunakan hasil dari jimpitan ini untuk kebutuhan seperti pembayaran listrik, perbaikan fasilitas, dan terkadang untuk menyediakan buku bagi santri yang kurang mampu. Ada juga transparansi dalam penggunaannya. Setiap bulan, kami mengumumkan jumlah yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut digunakan,"* ungkapnya, sambil menekankan pentingnya transparansi untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui laporan keuangan rutin.

Salah satu wali santri mengapresiasi sistem ini karena mudah diakses dan tidak memberatkan. *"Bagi kami, jimpitan adalah cara sederhana tetapi efektif untuk mendukung pendidikan anak-anak kami. Dengan kontribusi kecil ini, kami merasa ikut berperan dalam mendukung madrasah. Walaupun kontribusi kami tidak besar, kami merasa bangga bisa membantu,"* katanya, menambahkan bahwa jimpitan juga membangun rasa kebersamaan yang erat antara masyarakat dan madrasah.

Pelaksanaan sistem ini dimulai dari sosialisasi kepada wali santri, pengumpulan dana atau hasil bumi secara rutin, hingga pengelolaan yang transparan untuk berbagai kebutuhan operasional seperti perawatan fasilitas dan subsidi pendidikan bagi santri yang membutuhkan. Dampak positif dari sistem ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan operasional madrasah, tetapi juga meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Studi mendukung bahwa praktik gotong royong seperti ini memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan.

Seorang guru dari madrasah menyampaikan bahwa sistem gotong royong berbasis jimpitan yang diterapkan di sekolah mereka memiliki dampak positif dalam mendukung operasional sekolah. Ia menjelaskan, *"Sistem ini sangat efektif dalam memastikan kebutuhan dasar sekolah tetap terpenuhi. Karena kontribusinya sukarela, wali santri tidak merasa terbebani, tetapi tetap merasa memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak mereka. Manfaatnya sangat terasa terutama ketika dana dari pemerintah atau donatur tidak mencukupi."*

Guru tersebut juga menyebutkan bahwa selain membantu pembiayaan, sistem ini menciptakan hubungan harmonis antara masyarakat dan pihak sekolah. Ia menambahkan, *"Selain memenuhi kebutuhan material, sistem ini juga mengajarkan nilai kebersamaan*

kepada santri. Mereka melihat bahwa pendidikan membutuhkan kerja sama semua pihak, bukan hanya tugas guru atau pemerintah.”

Seorang pengurus sekolah memberikan pandangan mengenai manfaat sistem tersebut dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan sekolah. Ia mengatakan, *“Hasil dari sistem ini digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan fasilitas, pembayaran gaji guru honorer, atau pembelian alat tulis bagi siswa yang kurang mampu. Dana yang terkumpul juga bisa menjadi cadangan untuk situasi darurat, misalnya kerusakan mendadak pada fasilitas.”*

Pengurus tersebut juga menyoroti efektivitas sistem ini dalam mendorong stabilitas keuangan sekolah. *“Sistem ini menciptakan stabilitas karena adanya aliran dana kecil namun konsisten. Kami tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber dana seperti BOS. Dengan kombinasi dari berbagai sumber, sekolah lebih tahan terhadap perubahan kebijakan atau keterlambatan pencairan dana.”*

Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi untuk memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. *“Kami rutin menyampaikan laporan keuangan kepada wali santri dalam pertemuan bulanan. Dengan begitu, mereka tahu bagaimana dana mereka digunakan dan ini meningkatkan kepercayaan terhadap sistem yang kami jalankan.”*

Sistem gotong royong berbasis jimpitan ini terbukti memberikan manfaat besar terhadap keberlanjutan pembiayaan sekolah. Dari wawancara, terlihat bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pendanaan alternatif, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara masyarakat dan sekolah. Efektivitasnya terletak pada sifat kontribusi yang fleksibel, sehingga tidak membebani pihak manapun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkatkan rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan.

Dari segi keberlanjutan, pengumpulan dana secara rutin melalui mekanisme sederhana memberikan stabilitas finansial jangka panjang. Selain itu, laporan transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung keberlangsungan sistem. Studi juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana secara transparan mampu meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan.

Sistem jimpitan sering menghadapi beberapa tantangan utama, terutama terkait dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah. Banyak wali santri yang belum menyadari pentingnya kontribusi mereka terhadap keberlanjutan sekolah, sering kali merasa bahwa sumbangan mereka tidak signifikan atau tidak memiliki dampak langsung. Karena sifatnya

yang sukarela, jumlah kontribusi juga sering tidak konsisten, sehingga menyulitkan perencanaan anggaran yang tepat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana sering kurang optimal. Banyak madrasah belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang terstruktur, yang dapat menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Keterbatasan sumber daya pengelolaan juga menjadi masalah, terutama di madrasah yang dikelola secara sederhana, yang sering kekurangan tenaga atau keterampilan administrasi. Kondisi ekonomi masyarakat, terutama saat musim paceklik atau krisis ekonomi, juga mempengaruhi kemampuan wali santri untuk berkontribusi.

Untuk mengatasi kendala ini, beberapa strategi dapat diterapkan: 1) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya jimpitan melalui pertemuan rutin dan media visual. 2) Menciptakan sistem kontribusi yang fleksibel dengan opsi berupa uang atau hasil bumi, tanpa nominal tetap, agar lebih inklusif. 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan laporan keuangan yang sederhana namun rinci, disampaikan secara rutin kepada wali santri. 4) Memberikan pelatihan pengelolaan dana kepada pengurus madrasah untuk meningkatkan keterampilan manajemen keuangan. 5) Diversifikasi sumber dana melalui program tambahan seperti penggalangan dana komunitas, bazar, atau mencari donatur tetap. 6) Memperkuat nilai gotong royong melalui kegiatan bersama untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Dengan strategi ini, sistem jimpitan diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi madrasah dan komunitas.

Penerapan sistem jimpitan di madrasah lain memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan pendidikan, terutama di wilayah dengan sumber daya terbatas. Sebagai bentuk gotong royong, sistem ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala pendanaan asalkan didukung oleh beberapa faktor kunci antara lain: 1) Sosialisasi yang efektif kepada pemangku kepentingan, seperti orang tua, guru, dan masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat jimpitan. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin dan media komunikasi, seperti grup WhatsApp atau poster. 2) Fleksibilitas kontribusi, baik berupa uang tunai maupun barang seperti hasil bumi, perlu diutamakan agar sistem ini inklusif dan tidak membebani masyarakat dengan kondisi ekonomi beragam. 3) Penguatan nilai gotong royong melalui kegiatan bersama, seperti kerja bakti atau acara keagamaan, dapat mempererat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan, yang dapat diwujudkan melalui laporan keuangan rutin dan terbuka. Selain itu, pelatihan manajemen keuangan bagi pengurus sekolah akan membantu pengelolaan dana lebih efektif, sementara diversifikasi sumber pendanaan, seperti bazar atau donatur tetap, dapat mengurangi ketergantungan pada jimpitan. Dengan langkah-langkah ini, sistem jimpitan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi madrasah dan komunitas sekitar.

KESIMPULAN

Sistem jimpitan menawarkan solusi inovatif dan partisipatif untuk mengatasi tantangan pendanaan pendidikan di daerah pedesaan Indonesia, dimana ketimpangan dengan daerah perkotaan sangat nyata. Sistem ini memanfaatkan kontribusi sukarela dari masyarakat, baik berupa uang maupun hasil bumi, untuk mendukung operasional madrasah, terutama madrasah yang sering kali bergantung pada dana pemerintah yang tidak mencukupi. Agar sistem ini efektif, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wali santri dan masyarakat mengenai manfaat dan cara kerjanya. Edukasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan rasa kepemilikan terhadap pendidikan di lingkungan masing-masing, sehingga mendorong partisipasi aktif. Selain itu, fleksibilitas dalam sistem kontribusi harus diutamakan, dengan memberikan alternatif sumbangan agar lebih inklusif dan tidak membebani masyarakat dengan kondisi ekonomi yang beragam.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana melalui pelaporan keuangan yang terbuka dan rutin adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sekolah harus memastikan adanya pelaporan yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Pelatihan manajemen keuangan bagi pengurus madrasah juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana jimpitan, memungkinkan perencanaan alokasi dana yang lebih tepat. Diversifikasi sumber dana melalui inisiatif komunitas dan kerjasama dengan sektor swasta dapat memperkuat sistem ini dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan. Penguatan nilai gotong royong melalui kegiatan bersama, seperti kerja bakti atau acara keagamaan, dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Dengan pendekatan yang terstruktur, sistem jimpitan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan pendidikan lokal, menjadi model yang dapat diterapkan di tempat lain, dan membangun solidaritas sosial serta meningkatkan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A. (2023). *MULTIFINANCE Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan PENELITIAN ETNOGRAFI TENTANG PRAKTIK EKONOMI KOMUNITAS BERBASIS DESA*. 1(1). <http://altinriset.com/journal/index.php/multifinance>
- Andrea, D. L. (2020). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jihk*, 5(2), 14–24. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.43>
- Arsana, I. N. A., & Lestari, A. S. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Laporan Keuangan Pada SMP Nasional Berbasis Web. *Jurnal Krisnadana*, 1(1), 47–56. <https://doi.org/10.58982/krisnadana.v1i1.81>
- Aslindah, A. (2022). Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan Yang Efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (Jimpian)*, 2(2), 65–74. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v2i2.2606>
- Banjarnahor, R. R. (2024). Analisis Sumber Dana Pendidikan SMKS St.Nahanson Parapat Sipoholon. *Jurilma*, 1(1), 63–71. <https://doi.org/10.69533/841y2b87>
- Candradewi, I. A. P. (2023). Pengembangan Sistem Arus Kas Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Di Tempat Wisata Mekarsari. *Kemas*, 1(1), 36–45. <https://doi.org/10.31851/kemas.v1i1.11496>
- Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative & quantitative approaches. In *Research design: Qualitative & quantitative approaches*. Sage Publications, Inc.
- Darmawan, R. (2024). Education Financing Model Transformation to Build Education Accessibility Through Free School Fees at PKBM Golden. *Adv*, 2(5), 755–767. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i5.242>
- Diana, M. R. (2023). Pengembangan Sumber Dan Alokasi Pendanaan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(3). <https://doi.org/10.58258/jime.v9i3.5398>
- Diarto, H. C. (2018). Pengembangan Wilayah Perdesaan Berbasis Pada Potensi Sumber Daya Alam Di Kabupaten Bondowoso. *Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 102–122. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2528>
- Gunadhi, E., Garut, S. T. T., Satria, E., & Saepul, J. (2019). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekolah. *Jurnal Algoritma*, 16(2), 286–292. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.16-2.286>
- Hadiwiyanti, R. (2021). Perancangan Sistem Keuangan Sekolah Dengan Prototyping (Studi

- Kasus : Madrasah Aliyah Nu Sidoarjo). *Konstelasi Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(2), 382–390. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v1i2.4298>
- Hidayatika, V. M. (2024). Perancangan Sistem Informasi Pencatatan Keuangan Di TK Lestari Berbasis Website. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Elektro Dan Komputer*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.51903/juritek.v4i1.2825>
- Huda, G. G. N. (2016). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekolah Menengah Atas Menggunakan Metode Pendekatan Unified Approach. *Jurnal Algoritma*, 13(1), 226–231. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.13-1.226>
- Isma, A. (2023). Peta Permasalahan Pendidikan Abad 21 Di Indonesia. *J. Pendidik. Terap.*, 11–28. <https://doi.org/10.61255/jupiter.v1i3.153>
- Khosyi'in, M., Kurniadi, D., & Budisusila, E. N. (2023). Pengembangan Dan Model Pendampingan Penggunaan Sistem Keuangan Yayasan. *Jurnal Abdi Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 123–128. <https://doi.org/10.26740/abdi.v8i2.15832>
- Khotimah, B. K., & Iswati, I. (2015). Pengelompokan Wilayah Madura Berdasar Indikator Pemerataan Pendidikan Menggunakan Partition Around Medoids Dan Validasi Adjusted Random Index. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jisebi.1.1.17-24>
- Luqman, F. (2023). Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan Di Daerah Pedesaan. *Saree*, 5(1), 71–88. <https://doi.org/10.47766/saree.v5i1.920>
- Manurung, N., Hidayatullah, R. S., & Nurullaeli, N. (2021). Perancangan Sistem Informasi Keuangan Pada Toko Kue Ibu Danis Berbasis Java. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (Jrami)*, 2(01). <https://doi.org/10.30998/jrami.v2i01.790>
- Moridu, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Sosial Dan Kewirausahaan Sosial Dalam Menangani Masalah Sosial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(01), 42–53. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i01.143>
- Nasution, N., & Hasan, M. A. (2021). Ibm Aplikasi Keuangan Pada Sekolah Dasar Luhuring Budi Kecamatan Rumbai. *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.3492>
- Nursiniah, S. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar. *Karimahtauhid*, 3(3), 2832–2855. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12275>
- Permana, H. (2023). Pelatihan Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu

- Pondok Pesantren Almushlih Karawang. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(2), 54–61.
<https://doi.org/10.54783/ap.v4i2.28>
- Prayitno, A. (2023). Perancangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Metode Progressive Web Apps (Studi Kasus : SDIT Zahra Asy Syifa Patumbak Deli Serdang). *Bulletin of Information Technology (Bit)*, 4(1), 9–14.
<https://doi.org/10.47065/bit.v4i1.452>
- Putra, J. A. (2023). Pengembangan Aplikasi RAPBS Pengelolaan Dana Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. *Digital Transformation Technology*, 3(2), 548–556. <https://doi.org/10.47709/digitech.v3i2.2914>
- Rahayu, S., & Rahayu, P. A. (2014). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Web Di Sekolah Menengah Kejuruan Islam Atturmudziyyah Garut. *Jurnal Algoritma*, 14(2), 538–545. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.14-2.538>
- Rahmad, R. (2021). Nilai Karakter Cinta Tanah Air Dan Gotong Royong Pada Kearifan Lokal Manugal Sebagai Sumber Belajar Ips Di Sekolah Dasar. *Mendidik Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 220–227. <https://doi.org/10.30653/003.202172.193>
- Rahmawati, S. M., Supriatono, B., Kunci:, K., Partisipatif, A., Perencanaan, ;, & Musrenbang, P. ; (2019). IMPLEMENTASI PENGANGGARAN PARTISIPATIF DI INDONESIA. *SIKAP*, 4(1), 12–20. <http://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/sikap>
- Rejeki, S. (2023). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Banjarsari Solo. *Wasana Nyata*, 7(2), 120–124.
<https://doi.org/10.36587/wasananyata.v7i2.1624>
- Rusandi, M. A. (2023). Pendampingan Bimbingan Belajar Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Siswa SD Di Kelurahan Bagan Keladi, Dumai, Provinsi Riau. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 3(3), 157–163.
<https://doi.org/10.31258/cers.3.3.157-163>
- Sarjito, A. (2023). Dampak Digitalisasi Administrasi Perdesaan Di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(2), 106–124.
<https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3814>
- Setianti, N. (2024). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter Pada Gereja GKII Purbalingga. *Smart Comp Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, 13(2). <https://doi.org/10.30591/smartcomp.v13i2.5672>
- Setiawansyah, S., Sulistiani, H., Sulistiyawati, A., & Hajizah, A. (2021). Perancangan Sistem

Pengelolaan Keuangan Komite Menggunakan Web Engineering (Studi Kasus : SMK Negeri 1 Gedong Tataan). *Komputika Jurnal Sistem Komputer*, 10(2), 163–171.
<https://doi.org/10.34010/komputika.v10i2.4329>

Sofiani, N. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>

Suhandi, A., & Robi'ah, F. (2022). Guru Dan Tantangan Kurikulum Baru: Analisis Peran Guru Dalam Kebijakan Kurikulum Baru. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5936–5945.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3172>

Ulfa, M. (2023). Potret Kondisi Sekolah Daerah Terpencil Di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Jupe2*, 1(1), 11–26.
<https://doi.org/10.54832/jupe2.v1i1.90>